



## Serapan Anggaran Belum Capai Target

# Serapan Anggaran Belum Capai Target

**MAKASSAR, FAJAR** — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun anggaran 2024 sudah memasuki triwulan terakhir. Namun, serapan anggaran belum mencapai target.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel,

Salehuddin mengatakan, serapan anggaran hingga triwulan III (Januari-September) baru menginjak kisaran 62 persen. Angka ini menurutnya, belum menurun dan belum mencapai target dibanding tahun sebelumnya.

••Baca Serapan... Hlm 11



Serapan  
anggaran  
62 persen.  
Rata-

rata yang sudah direncanakan kemarin (terserap). Normalnya TW III itu sekitar 73 persen."

**Salehuddin**  
Kepala BKAD Sulsel

# Serapan Anggaran Belum Capai Target

••Lanjutan Halaman... 9

Diketahui, APBD Pemprov Sulsel pada TA 2024 ialah Rp10,031 triliun. 62 persen dari angka tersebut berarti Rp6,2 triliun yang sudah dibelanjakan.

"Serapan anggaran 62 persen. Rata-rata yang sudah direncanakan kemarin (terserap). Normalnya TW III itu sekitar 73 persen," ujar Bobby, sapaannya, baru-baru ini.

Ia menerangkan bahwa Pemprov Sulsel harus mengambil langkah percepatan belanja tersebut. Beberapa OPD yang menjadi perhatian adalah yang menerima dana transfer besar dari Pemerintah Pusat.

Dana transfer yang dimaksudkan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik. Berupa program strategis pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

"(OPD harus dipercepat), misalnya Dinas Pendidikan besar (dana transfer). Ke-PU-an besar,

seperti Dinas BMBK, dan Dinas SDA-CKTR," tambah Bobby.

Pemprov Sulsel juga saat ini tengah digenjut realisasi belanja dari dana transfer pusat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 25 persen dana transfer pusat dikelola pada APBD Sulsel. Sedangkan masih ada tujuh OPD yang realisasinya di bawah 70 persen.

Kata Bobby, dari hasil rapat bersama DjPB Kemenkeu RI, mereka memberi batas hingga 21 Oktober untuk memaksimalkan realisasi. Adapun OPD tersebut contohnya Dinas Pendidikan, Dinas BMBK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas TPH-Bun, dan Diskop UMKM.

"Saya sama Pak Sekprov dan Pak Gubernur komitmen jangan selalu injury time baru cair. Sebelum tanggal 21 kalau bisa clear. Pasti clear kita maunya jangan sampai injury time. Paling tidak pekan depan," beber Bobby.

Sekprov Sulsel, Jufri

Rahman, meminta agar 16 OPD yang mengelola dana transfer dari pusat, baik itu Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, untuk mempercepat realisasi belanjanya. Menurut ketentuan yang ada, pada triwulan kedua minimal capaian realisasinya sudah mencapai 70 persen.

"Yang kurang dari 70 (persen) tadi, kita (bersama) Pak Kanwil Ditjen meminta apakendalayang dihadapi, apa sebabnya, kemudian beliau (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan) memberikan kiat-kiatnya," jelasnya.

Pada penyusunan APBD 2025, ada mandatori spending diatur 20 persen bagi sektor pendidikan. Sementara sektor kesehatan tidak lagi ditentukan 10 persen seperti tahun sebelumnya, asalkan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara belanja pegawai maksimal 30 persen. Ada infrastruktur, APIP, dan pendidikan pelatihan. (uca/yuk)